



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
BANK SAMPAH DI DESA LEREP, KECAMATAN UNGARAN
BARAT, KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Disajikan sebagai salah satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pendidikan Luar Sekolah

Oleh

Aniq

1201415040

**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada sidang skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.
NIP. 196801211993032002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dra. Liliek Desmawati, M.Pd.
NIP. 195912011984032002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang” telah dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Hari : *Senin*

Tanggal : *23 Desember 2019*

Panitia Ujian Skripsi

 Ketua
[Signature]
Dr. Achmad Rifa'i RC, M.Pd.
NIP.195908211984031001

Sekretaris,

[Signature]
Abdul Malik, M.Pd.
NIP.198103102015041004

Penguji I,

[Signature]
Dr. Utsman, M.Pd.
NIP.196006051999032001

Penguji II,

[Signature]
Dr. Emmy Budiartati, M.Pd.
NIP.195601071986012001

Dosen Pembimbing

[Signature]
Dra. Liliek Desmawati, M.Pd
NIP. 195912011984031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aniq

NIM : 1201415040

Prodi : Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas : Ilmu Pendidikan, UNNES

Menyatakan bahwa laporan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang” dan semua isi laporan skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan meniru/menjiplak karya orang lain. Jika ada pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam laporan skripsi, saya kutip berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 27 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Aniq

1201415040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

–Q.S. Al-Baqarah: 286.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ahmad Shoim (alm.) dan Ibu Shofiyatun, beserta saudaraku Kang Faizin, Kang Choirul, Kang Abdul, Kang Badrul dan Adik Fatimatuzzahro’.
2. Sahabat-sahabat terdekat Tri Utomo, Cegri, Alwy, Richo, Joko, Arif, Khaled, Danang, Ilham, Heri, Arijal dan Feliq.
3. Sahabat-sahabat di Takmir Masjid FIP UNNES, Mas Dahlan, Nanang, Udin dan Ihsan.
4. Keluarga besar ROA (rombel dua) PLS UNNES 2015.
5. Teman-teman seperjuangan PLS UNNES 2015.
6. Keluarga Fungsiaris Himpunan Mahasiswa 2016 dan 2017.
7. Keluarga besar FUMMI (Forum Ukhuwah Mahasiswa Muslim Ilmu Pendidikan) UNNES 2016, 2017 & 2018.
8. Keluarga PMII Rayon Garuda dan PMII Al Ghozali Semarang.
9. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan.
10. Almamater tercinta Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan Rahmat, Inayah , dan Hidayahnya, penulis dapat menyusun hingga menyelesaikan laporan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang”** dengan baik dan lancar.

Penulis bersyukur karena telah banyak pihak yang mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu penulis pada penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Dr. Achmad Rifa’i RC, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk penyelesaian penelitian skripsi ini.
2. Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
3. Dra. Liliek Desmawati, M.Pd., Dosen Pembimbing yang telah kebersamai dengan memberikan saran dan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
5. Kepala Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang telah berkenan memberikan izin penelitian.

6. Bapak Richard Eko Nugroho, Direktur Bank Sampah Soka Lerep yang telah berkerjasama dalam membantu memberikan informasi dan petunjuk selama penelitian.
7. Subjek dan informan, yang telah bersedia memberikan informasi dengan sebenarnya sehingga penelitian bisa berjalan dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan segala kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati apabila terdapat saran dari pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 27 Agustus 2019

Aniq

ABSTRAK

Aniq. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Liliek Desmawati, M.Pd.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Bank Sampah, Masyarakat Desa

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan dan sikap masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses tahapan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Desa Lerep dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berlangsungnya pemberdayaan?. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses tahapan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah serta faktor pendukung dan penghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Subjek penelitian, meliputi pengurus Bank Sampah yang berjumlah 2 orang dan informan 3 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep dilaksanakan melalui tiga proses tahapan pemberdayaan. Proses tahapan pemberdayaan tersebut meliputi tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan dan tahap pembentukan perilaku. Tahap penyadaran dilakukan melalui proses kegiatan sosialisasi ke lingkungan masyarakat. Tahap transformasi kemampuan dilaksanakan dengan adanya program-program kegiatan utama bank sampah berupa program tabungan sampah, pelatihan daur ulang sampah, pembayaran BPJS-KT menggunakan sampah dan program pelatihan pembuatan kompos Takakura. Tahap peningkatan kemampuan dilaksanakan melalui pembiasaan untuk mengarahkan masyarakat menuju berkemampuan mandiri dalam pengelolaan sampah. Pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Desa Lerep ditemukan perbedaan kemampuan dan kesadaran masyarakat yang meningkat dari kebiasaan buang sampah sembarang menuju pada kesadaran untuk mengelola serta mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat dan bersih untuk lingkungan. Faktor yang menjadi pendukung pemberdayaan masyarakat adalah semangat pengurus bank sampah dan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Sedangkan faktor penghambat utama berupa gedung bank sampah yang masih ditempati bersama dengan PAUD.

Simpulan penelitian yaitu keberadaan bank sampah di Desa Lerep berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk sadar dalam pengelolaan serta pengolahan sampah, terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya, baik mendukung maupun menghambat. Saran yang dapat diberikan, yaitu pengurus lebih aktif lagi dalam melaksanakan evaluasi untuk meningkatkan kinerja program.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Penegasan Istilah.....	13
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Pemberdayaan	17
2.2 Masyarakat.....	34
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	36
2.4 Bank Sampah	37
2.5 Kerangka Berfikir	50
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Metodologi Penelitian.....	52
3.2 Fokus Penelitian.....	53

3.3	Lokasi Penelitian.....	53
3.4	Subjek Penelitian	54
3.5	Sumber Data.....	55
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7	Keabsahan Data	57
3.8	Teknik Analisi Data	59
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Hasil Penelitian	62
4.2	Pembahasan.....	89
BAB 5 PENUTUP		104
5.1	Simpulan	104
5.2	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN.....		113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Inventaris Bank Sampah Soka Resik	68
Tabel 2. Jenis Pendanaan, Sumber dan Jumlah Pendanaan Bank Sampah	70
Tabel 3. Daftar Nasabah Bank Sampah Soka Resik	76
Tabel 4. Jenis Sampah Nilai Beli dan Nilai Jual di Bank Sampah	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	51
Gambar 2. Siklus Komponen Analisis Data	61
Gambar 3. Struktur Organisasi Bank Sampah Soka Resik	67
Gambar 4. Mekanisme Cara Menabung di Bank Sampah Soka Resik	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	114
Lampiran 2. Pedoman Observasi	124
Lampiran 3. Hasil Observasi.....	127
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	130
Lampiran 5. Hasil Wawancara	139
Lampiran 6. Pedoman Dokumentasi	183
Lampiran 7. Hasil Dokumentasi	184
Lampiran 8. Catatan Lapangan	188
Lampiran 9. Surat Izin Melaksanakan Penelitian	193
Lampiran 10. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian	194

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan semakin hari menjadi diskursus yang sangat menarik untuk dibahas dan untuk ditemukan solusinya. Dewasa ini semakin terlihat banyaknya permasalahan lingkungan yang ada dan semakin besar ancamannya untuk kehidupan alam dan manusia. Berbagai permasalahan lingkungan mulai dari skala dunia seperti pemanasan global hingga skala lokal seperti banjir dan polusi masih hadir menjadi ancaman. Bahkan kondisi seperti ini bisa bertambah semakin buruk apabila tidak ada tindakan atau penanganan serius dari semua pihak.

Sampah merupakan salah satu penyebab masalah yang timbul dalam begitu banyak masalah lingkungan yang ada. Berangkat dari proses kehidupan sehari-hari manusia yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Dimana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif kegiatan ekonomi adalah adanya sebuah cara dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Akan tetapi kegiatan ekonomi juga meninggalkan dampak negatif untuk kelangsungan dan kualitas hidup manusia itu sendiri, yaitu berupa permasalahan penumpukkan sampah. Sebagian masyarakat bahkan melakukan eksploitasi alam untuk memenuhi hasrat keamanan ekonomi, dan dengan dalih untuk mengsucceskan program pembangunan (Sufia & Amirudin, 2016: 726). Sampah merupakan hasil material dari adanya suatu proses/kegiatan (Shentika, 2016: 92). Keberadaan sampah bisa sangat mengkhawatirkan dan sangat perlu adanya penanganan yang baik.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa definisi sampah merupakan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengertian tersebut mengarahkan bahwa sumber sampah adalah berasal dari kegiatan masyarakat itu sendiri, baik dari lingkungan rumah tangga sampai dengan hasil produksi industri. Berdasarkan data BPS pada tahun 2016 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang. Angka tersebut sangat tinggi dengan rata-rata per orang memproduksi sampah 0,7 kg setiap harinya, bahkan angka tersebut akan sangat bisa bertambah dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan wilayah yang sebagai tempat tinggal masyarakat bersifat statis dan cenderung untuk mengalami penyusutan.

Pertumbuhan produksi sampah di setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor tertentu yang ada. Daerah perkotaan menjadi wilayah memiliki dampak permasalahan sampah yang lebih tinggi jika dibandingkan wilayah pedesaan. Pesatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan pola konsumtif masyarakat di Indonesia membawa dampak meningkatnya jumlah sampah atau limbah rumah tangga (Kusminah, 2018: 22). Meskipun begitu, kondisi tersebut dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di wilayah pedesaan akan membawa masalah sampah yang juga serius. Pola permasalahan yang ada di perkotaan akan masuk juga ke wilayah pedesaan. Permasalahan akan semakin buruk dengan melihat kenyataan bahwa kesadaran masyarakat akan lingkungan masih belum baik. Sehingga apabila tidak adanya kesiapan masyarakat desa untuk bisa menghadapi tantangan pertumbuhan produksi sampah maka akan membawa

mereka menikmati dampak yang sama parahnya seperti halnya yang sudah terjadi di wilayah perkotaan.

Permasalahan sampah di daerah pedesaan memiliki karakteristik masalahnya tersendiri. Sampah yang diproduksi di daerah pedesaan didominasi dari sampah dari hasil rumah tangga. Sampah rumah tangga yang diproduksi oleh masyarakat inilah yang menjadi masalah utama di wilayah pedesaan. Lebih lanjut lagi, sampah rumah tangga yang diproduksi oleh masyarakat secara umum di bagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik memiliki sifat untuk bisa terurai kembali secara langsung dengan alam, sedangkan sampah non-organik tidak bisa terurai secara langsung oleh alam (Utami, 2013: 4). Sehingga dalam penanganan kedua jenis sampah tersebut memiliki perbedaan.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat akan menimbulkan berbagai masalah seperti banjir, polusi tanah, polusi air dan polusi udara. Dampak lainnya juga adalah merusak sistem tata ruang di wilayah tersebut dengan timbulnya perkampungan kumuh (*slum*), serta secara tidak langsung juga akan mempengaruhi berbagai aspek lainnya di luar lingkungan alam (Riyadi, 2014: 207). Kondisi perekonomian wilayah juga akan terganggu dan lebih parahnya adalah akan menyebabkan penyakit yang bisa menyerang kesehatan masyarakat hingga berujung pada ancaman kematian.

Faktor dari dalam masyarakat masih menjadi hambatan dalam yang kuat, selain juga kondisi sosial dan lingkungan. Gopal Gahana, dkk. (2018: 536) dalam sebuah penelitian Jurnal Internasionalnya menyebutkan :

“.....unscientific waste disposal and unscientific planning are the two major hindrances with high dependence driven by poor social values and ethics, huge population and illiteracy.”

Faktor kesadaran masyarakat dalam menanggapi masalah sampah menjadi salah satu yang paling pokok, sebagaimana dari penjelasan Gopal Gahana tersebut. Masyarakat kurang memiliki kesadaran bahwa pada kegiatan ekonomi dan rumah tangga yang mereka lakukan ada aspek-aspek pendukung lainnya yang harus diperhatikan khususnya adalah lingkungan (Shentika, 2016: 92). Sebagian besar masyarakat desa memiliki kecenderungan belum mengetahui mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah yang dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang baik. Masyarakat memerlukan edukasi mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah untuk membentuk kesadaran masyarakat (Asteria & Heruman, 2016: 137). Paradigma mendasar dari masyarakat perlu diubah dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma sebelumnya yang kumpul–angkut–buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah yang baik dan benar (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012).

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka dalam praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah. Penting kiranya masyarakat didorong dalam usaha meninggalkan cara lama menyikapi sampah dengan hanya dibuang langsung menjadi dengan pendidikan dan pembiasaan untuk memilah, memilih, dan menghargai sampah sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan (Tallei, 2013

dalam Asteria, 2016: 137). Perubahan pola pikir masyarakat ke-arah yang lebih baik tentunya akan meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Pendidikan memiliki peranan penting untuk mengubah perilaku buruk masyarakat terhadap lingkungan. Pelaksanaan pendidikan yang mengarah pada kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup sangat penting adanya. Suaedi & Tantu (2016) mengungkapkan pendidikan lingkungan hidup sebagai proses menanamkan kesadaran dan peduli lingkungan yang akan memunculkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, tingkah laku, motivasi dan komitmen terhadap permasalahan lingkungan (Suaedi & Tantu, 2016 dalam Annisa & Abrori, 2018: 76). Pendidikan yang dilaksanakan masyarakat saat ini yang mengarah pada pendidikan lingkungan masih terbatas kepada pendidikan formal. Hal tersebut artinya pendidikan lingkungan masih relatif terbatas pada masyarakat usia sekolah. Sedangkan masyarakat diluar usia sekolah yang sebagian besar merupakan pemuda dan orang tua belum secara maksimal tersentuh pendidikan lingkungan.

Permasalahan seperti yang telah dijelaskan tersebut, dimana pendidikan formal di masyarakat tidak mampu secara maksimal melakukan fungsi pendidikannya maka diperlukan pendidikan pada jalur lain yaitu pendidikan informal dan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan semua jenis pendidikan yang berlangsung di luar sekolah secara terstruktur. Pendidikan nonformal memiliki peranan sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti dari pendidikan formal (Sudjana, 2014: 74). Joko Sutarto (2007: 42) juga menjelaskan bahwa sebagai pelengkap pendidikan formal, pendidikan nonformal diselenggarakan

untuk melengkapi apabila didalam pelaksanaan pendidikan tersebut terdapat suatu kekurangan pada program-program yang dilaksanakan dan memang dirasa sangat diperlukan serta memang belum pernah diterima oleh peserta didik itu sendiri.

Salah satu metode pendidikan nonformal adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (3), diamana menyebutkan bahwa : Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperan serta dalam pembangunan. Dampak dari pemberdayaan akan bisa menambah kontribusi pada pengetahuan masyarakat, sikap dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas diri masyarakat hingga menuju kepada kemandirian dan peningkatan pendapatan (Desmawati, dkk, 2015: 80). Pembangunan merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh semua orang atau masyarakat, karena dengan pembangunan diharapkan akan terjadi suatu perubahan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam masalah lingkungan dan sampah terdapat sebuah sistem yang dinamakan bank sampah. Kehadiran bank sampah mendorong adanya *capacity building* bagi warga dengan mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong partisipasi mengelola

lingkungan di komunitasnya (Asteria & Heruman, 2016: 141). Bank sampah memiliki fungsi untuk mengelola sampah dengan menampung, memilah dan mendistribusikan sampah ke tempat pengolahan sampah yang lain atau kepada pihak yang membutuhkan (Utami, 2013: 3). Sehingga sampah yang menumpuk di pemukiman ataupun tempat pembuangan akhir bisa berkurang dan bahkan akan bisa menambah nilai guna barang atau sampah tersebut.

Bank sampah pada dasarnya merupakan sebuah konsep pengumpulan sampah kering dengan tahapan pemilahan yang memiliki manajemen layaknya perbankan konvensional, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah (Asteria, 2016: 137). Peran bank sampah sebagai pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri menjadi sangat penting. Bank sampah sangat membantu masyarakat sehingga mereka dapat secara mandiri memilah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, dijual, dan didaur ulang serta menjadikan nasabah (masyarakat) menjadi mandiri, meningkatkan *skill* dan pengetahuan (Romadoni, Tahyuddin & Husin, 2018: 38). Sistem pengelolaan sampah mandiri memiliki daya kemampuan terbesar dalam proses mengurangi potensi pencemaran lingkungan (Iswanto, dkk., 2016: 186). Selain pada fungsi lingkungan, bank sampah juga memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi walaupun secara nilai belum signifikan dibandingkan dengan pengembangan bahan produksi lainnya.

Konsep program bank sampah sendiri merupakan sebuah bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang mengintegrasikan prinsip 3R pada proses pengelolaannya yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle* dengan pengelolaan sedekat mungkin dengan sumbernya (Nugraha, Sutjahyo dan Amin, 2018: 8). *Reduce*

adalah mengurangi timbulan sampah pada sumbernya. *Reuse* merupakan upaya pemanfaatan kembali barang atau sampah yang sudah tidak berguna lagi. Sedangkan *recycle* adalah upaya mendaur ulang barang atau sampah menjadi barang lain yang memiliki fungsi lebih dan bernilai ekonomis lebih tinggi (Shentika, 2016: 94).

Sistem kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah seperti yang telah disebutkan tersebut sudah terdapat di beberapa daerah. Salah satunya adalah bank sampah yang terdapat di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Bank Sampah Desa Lerep merupakan upaya pemerintah desa dan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dalam penanganan sampah di wilayah mereka. Bank Sampah Desa Lerep menerapkan beberapa pelayanan yang dilaksanakan untuk upaya tersebut.

Layanan pertama dalam program bank sampah adalah tabungan sampah. Tabungan sampah merupakan layanan pokok dalam program bank sampah dan menjadi layanan utama. Layanan tabungan sampah memiliki pengertian yang hampir sama dengan pengertian bank sampah itu sendiri, yaitu peserta bank sampah (nasabah) menabungkan sampah miliknya ke bank sampah yang kemudian akan di konversikan menjadi uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan. Tabungan yang didapat bisa diambil sewaktu-waktu di bendahara bank sampah. Untuk layanan umum ini bertujuan utama untuk menjaga lingkungan masyarakat dengan mengurangi volume sampah khususnya sampah non-organik dari kegiatan rumah tangga. Partisipasi masyarakat juga akan dipicu dengan adanya

profit yang didapat masyarakat secara langsung dengan mendapatkan uang yang disimpan dalam tabungan bank sampah yang mereka dapat.

Layanan yang kedua yaitu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Layanan ini merupakan pengembangan dari fungsi program bank sampah. Pada sistem bank sampah yang sudah berjalan dalam waktu yang signifikan, masyarakat memiliki potensi ekonomi yang besar jika dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik pula (Utami, 2013: 8). Potensi ekonomis yang ada inilah dikembangkan dalam konsep pembayaran BPJS Ketenagakerjaan menggunakan tabungan sampah bagi warga masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti petani, tukang ojek, tukang bangunan dan lainnya. Sehingga potensi ekonomis yang terdapat dalam sistem bank sampah juga bisa masuk pada potensi jaminan sosial masyarakat.

Layanan selanjutnya adalah layanan daur ulang atau kreasi sampah non-organik menjadi barang bernilai ekonomis. Layanan ini juga merupakan bagian dari pengembangan potensi ekonomis yang dimiliki bank sampah. Dimana sampah hasil tabungan dari nasabah selanjutnya kembali dipilah oleh pengurus bank sampah sebelum akan dijual ke pengepul. Selanjutnya akan diambil barang yang sekiranya bisa untuk diolah dan dikreasikan kembali oleh masyarakat untuk dijadikan barang yang bernilai ekonomis lebih tinggi.

Pengkreasi sampah non-organik sendiri merupakan warga masyarakat yang sebagian adalah pengurus dan nasabah dari bank sampah yang sebelumnya melaksanakan pelatihan. Pelaksanaan layanan daur ulang lebih banyak menasar pada peserta perempuan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Sebagai pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab, wanita selain pada mengatur

urusan rumah tangga, juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kesehatan rumah serta meningkatkan mutu hidup dirinya dan keluarga (Nurmayasari & Ilyas, 2014: 19).

Pelatihan menurut Simamora (2012) dalam Hidayat (2018: 22) diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap individu. Sedangkan untuk pemasaran masih bersifat *eventual*, yaitu ketika adanya acara atau kegiatan masyarakat di Desa Lerep dan di beberapa tempat wisata di Desa Lerep sebagai *souvenir*.

Sistem bank sampah yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Lerep sangat membantu untuk proses pemberdayaan masyarakat setempat. Adanya kegiatan dari bank sampah mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesehatan dan kelestarian alam, khususnya dalam penanganan masalah sampah. Disisi lain, masyarakat yang sebagian besar bekerja disektor informal bisa juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui iuran sampah yang difasilitasi oleh bank sampah dengan mengikuti program BPJS – Ketenagakerjaan. Masyarakat juga bisa mengembangkan potensinya untuk berkreasi dengan mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis lebih tinggi.

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, bank sampah memiliki peran dalam hal pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah yang disebutkan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang?
- 1.2.2 Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- 1.3.1 Mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
- 1.3.2 Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaa bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi diri peneliti pribadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memiliki manfaat baik secara teoritismaupun praktis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pihak-pihak untuk menghasilkan atau mencapai sebuah program pemberdayaan masyarakat yang baik. Khususnya pada program pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah yang dilaksanakan di daerah-daerah terlebih oleh pemerintah desa. Sebagai suatu rujukan dalam usaha meningkatkan masyarakat yang sadar dan berdaya dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam masalah pengelolaan sampah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Bagi instansi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan referensi dan informasi yang digunakan instansi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa program inovasi lainnya yang ada dalam masyarakat desa saat ini.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian bisa digunakan sebagai penambah wawasan dan pengalaman tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan pada umumnya dan sampah pada khususnya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam usaha mewujudkan masyarakat diwilayahnya supaya bisa lebih sejahtera dan cerdas dalam penangan serta pemanfaatan sampah di lingkungannya. Selanjutnya pemerintah bisa mengembangkan berbagai

program pemberdayaan masyarakat lainnya yang berguna bagi kesejahteraan warga secara keseluruhan.

d. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian yang dilakukan bisa menambah keilmuan, pengetahuan dan juga wawasan tentang pelaksanaan suatu program pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.

1.5. Penegasan Istilah

Sebagai upaya mengantisipasi perbedaan penafsiran yang sangat mungkin terjadi dan juga bisa memudahkan dalam menemukan satu pemahaman, maka sangat perlunya untuk menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Maka karenanya dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah penting tersebut, antara lain sebagai berikut :

1.5.1. Pemberdayaan

Pemberdayaan ditinjau dari segi etimologi berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dari pemaknaan bahasa tersebut, bisa diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan pada keadaan berdaya atau proses memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan/atau proses pemberian dari yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum memiliki daya (Keban dan Lele, 1999 dalam Mulyono, 2017: 38). Secara lebih mendalam lagi dijelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal (Camber dalam

Noor, 2011: 88). Pemberdayaan yang dimaksud disini adalah pemberdayaan pada masyarakat peserta program Bank Sampah Desa Lerep dengan tujuan mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan sosial mereka dalam pengelolaan serta pemanfaatan sampah non-organik yang ada diwilayah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

1.5.2. Masyarakat

Menurut Harton & Hunt (1999: 59), masyarakat merupakan satu kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, memiliki kebudayaan yang sama, mendiami suatu wilayah tertentu dan melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompoknya. Masyarakat pada penelitian ini merupakan warga penduduk yang menetap di wilayah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

1.5.3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait pemberdayaan dan masyarakat merupakan sebuah proses atau usaha dalam memberikan daya pada sekelompok masyarakat tertentu. Pemberdayaan juga lebih jelasnya dimaknai sebagai setiap usaha pendidikan dengan tujuan membangkitkan kesadaran dan keinginan untuk memiliki pengetahuan (*knowledges*), keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*abilities*) yang pada akhirnya akan bisa digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Subekti 2018: 150).

1.5.4. Bank Sampah

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya (Asteria dan Heruman, 2016: 137). Pada sistem yang digunakan dalam bank sampah akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomis pada pasar tertentu sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari proses menabung sampah.

Kegiatan dari sistem bank sampah adalah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Seperti halnya bank konvensional pada umumnya, Bank sampah memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan sendiri oleh masyarakat (Utami, 2013: 3). Kegiatan inilah yang mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat melalui penekanan swadaya masyarakat. Pengelola bank sampah bisa ditentukan dan dibuat sendiri oleh masyarakat melalui forum musyawarah baik formal ataupun nonformal dari lingkungan masyarakat tersebut.

Warga yang menabung (menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik atau perusahaan pemanfaatan sampah lainnya yang sudah bekerja sama dengan bank sampah.

1.5.5. Desa Lerep

Lerep merupakan suatu desa yang berada terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lerep memiliki beberapa

keistimewaan, selain menjadi kota Kecamatan Ungaran Barat saat ini juga dikenal karena banyak memiliki tempat wisata. Selain itu, Desa Lerep juga dikenal baik dalam pengelolaan berbagai kegiatan masyarakat desa, salah satunya adalah bank sampah yang banyak dijadikan percontohan bagi beberapa desa lain dalam pengelolaan bank sampah-nya.

Desa Lerep mempunyai luas wilayah 6,82 km² dan dengan kepadatan penduduk 1.311 per km². Secara geografis terletak di dataran tinggi yang merupakan bagian lereng Gunung Ungaran dan mempunyai keindahan alam nan eksotis yang jarang terdapat di wilayah lain. Wilayah Desa Lerep terbagi menjadi 8 dusun, yaitu Dusun Tegalrejo, Dusun Karangbolo, Dusun Kretek, Dusun Mapagan, Dusun Lorong, Dusun Soka, Dusun Lerep dan Dusun Indrokilo.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang seharusnya terjadi dalam sebuah tujuan pembangunan baik dalam skala nasional maupun regional. Pemberdayaan dalam segi bahasa merupakan muatan asal kata dari “daya” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dari pemaknaan bahasa tersebut, bisa diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan pada keadaan berdaya atau proses memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan/atau proses pemberian dari yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum memiliki daya (Keban dan Lele, 1999 dalam Mulyono, 2017: 38). Penting kiranya disadari masyarakat menjadi lebih kompetitif apabila masyarakatnya berdaya guna (Muslikhah & Nurhalim, 2014: 48).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu “proses” yang biasanya menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan secara kronologis sistematis guna memberdayakan masyarakat miskin menuju kesejahteraan (Sulistiyani, 2004 dalam Andriyani, Marthono, Muhammad, 2017: 3). Konsep pemberdayaan sering disebut juga dalam bahasa Inggris oleh bangsa barat sebagai “*empowerment*” yang berarti memberikan sebuah kekuasaan atau otonomi. Pernyataan tersebut seperti disebutkan oleh Lowe (1995) dalam Mulyawan (2016: 64) yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut:

“the process as a result of which individual employees have the autonomy, motivation, and skill necessary to perform their jobs in a way which provides them with a sense of ownership and fulfillment while achieving shared organizational goals”

Berdasarkan definisi tersebut, pemberdayaan bermakna proses sebagai akibat dari mana individu memiliki otonomi, motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam satu cara yang memberikan mereka rasa kepemilikan dan pemenuhan bilamana tujuan-tujuan bersama organisasi.

Konsep pemberdayaan barat tersebut sering kali disebutkan sebagai yang menjadi latar belakang dari pemberdayaan di Indonesia. Akan tetapi Pranarka (1999) dalam Mulyono (2017: 39) menjelaskan, pemberdayaan sebenarnya merupakan khas Indonesia dari pada Barat. Lebih lanjut, pemberdayaan yang dimaksud bukanlah *“empowerment”* yang berarti memberi kekuasaan tetapi memberi *“daya”* atau kekuatan. Pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan kekuasaan pada kaum yang lemah, akan tetapi mengarah pada pemberian kesempatan individu atau kelompok untuk lebih berdaya.

Pemberdayaan selain pada proses pemberian daya atau kemampuan, pemberdayaan lebih jauh lagi merupakan sebuah pendidikan. Soetomo (2009) dalam Sutarto (2015: 136) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada. Sebagai suatu proses pembelajaran, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses peningkatan kemampuan pada seorang atau kelompok orang agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik

sehingga dapat memperbaiki kedudukannya di tengah-tengah masyarakat (Mulyono, 2017: 31).

Sebagai mana sering disebutkan dalam dunia pendidikan, proses belajar tersebut harus dilakukan secara terus menerus (*long life education*). Artinya bahwa pendidikan berlangsung terus menerus sepanjang hidup (*long life education*) dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap para peserta didik agar dapat mempersiapkan dirinya menyongsong tugas-tugasnya dimasa depan serta dapat membangun dirinya demi bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat, bangsa dan negaranya (Sucipto & Sutarto, 2015: 136).

Seperti yang disebutkan bahwa pemberdayaan pada pengertiannya diarahkan pada peningkatan kualitas individu atau kelompok. Pada pencapaian peningkatan kemampuan tersebut pemberdayaan memiliki pengertian sebagai unsur pendorong (*driving's force*), itu berarti pemberdayaan merupakan upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “*power*” (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*) (Huraerah, 2011: 100). Secara konseptual sebuah pemberdayaan wajib mencakup enam hal sebagai berikut :

a. *Learning by doing*

Learning by doing artinya pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan adanya suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus menerus serta dampaknya dapat terlihat.

b. *Problem solving*

Problem solving artinya suatu pemberdayaan harus memberi arti pada terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.

c. *Self – evaluation*

Self – evaluation berarti pemberdayaan harus mampu mendorong individu atau kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri.

d. *Self development and coordination*

Self development and coordination yaitu mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordiansi dengan pihak lain secara lebih luas.

e. *Self – selection*

Self – selection artinya kemampuan untuk tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian mandiri dalam menetapkan langkah-langkah masa depan.

f. *Self – decisim*

Self – decisim artinya kemampuan dalam pemilihan tindakan tepat yang bertumpu pada kepercayaan diri (*self-confidence*) (Saraswati, 1997 dalam Huraerah, 2011: 100).

Enam hal tersebut merupakan konsep yang perlu digunakan sebagai pembiasaan untuk berdaya. Sekaligus sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika bisa dilaksanakan secara terus menerus (*continue*).

Konsep pemberdayaan sering dimaknai dengan terbatas pada pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan (*proverty alleviation*) atau

penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*), sehingga kegiatan pemberdayaan selalu dilaksanakan hanya dalam sebuah bentuk pengembangan kegiatan yang produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*) (Mardikanto dan Soebianto, 2017: 113). Menanggapi hal tersebut, Sumadyo (2001) dalam (Mardikanto dan Soebianto, 2017: 113) merumuskan tiga pokok dalam setiap pemberdayaan, yaitu ; Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan atau biasa dikenal dengan istilah Tri Bina. Rumusan lainnya menyatakan kemiskinan bukan hanya kekurangan kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan, akan tetapi mencakup pada kebutuhan tambahan lainnya seperti pemukiman sehat, air bersih, kesehatan, sumber energi, pendidikan, transportasi, rekreasi dan lain-lain (Harahap, 2018: 42).

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki rumusan tujuan sesuai dengan penetapan definisinya sendiri. Dimana orientasi pemberdayaan itu sendiri adalah bertumpu terwujudnya kemandirian (Malik & Mulyono, 2017: 89). Lebih lengkapnya, pemberdayaan bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non pemerintah. Termasuk juga dalam pengurangan kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Ma'arif, dkk., 2016: 17).

Menurut Keban (1999) dalam Mulyono (2017: 41) tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir bertindak, dan mengandalkan apa yang mereka lakukan tersebut. Suharto (2007: 60) menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yang meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017: 111-112) tujuan pemberdayaan meliputi beberapa usaha perbaikan sebagai berikut:

a. Perbaikan Pendidikan (*better education*)

Perbaiki pendidikan disini yaitu mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Perbaikan aksesibilitas utamanya tentang sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan Tindakan (*better action*)

Perbaikan tindakan sebagai bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

d. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

e. Perbaikan Usaha (*better bussiness*)

Berupa perbaikan pendidikan (semangat belajar) pada perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki segala bentuk usaha yang dilakukan.

f. Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Adanya sebuah bisnis yang dilakukan maka terdapat harapan dalam memperbaiki pendapatan yang diperolehnya. Termasuk pendapatan individu keluarga dan masuk lebih besar lagi untuk masyarakat.

g. Perbaikan Lingkungan (*better environtment*)

Perbaikan lingkungan berupa perbaikan pendapatan yang diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Perbaikan pada tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, maka harapan untuk dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat semakin besar.

i. Perbaiki Masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang menjadi lebih baik dengan didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Berdasarkan pada uraian panjang tersebut terkait tujuan pemberdayaan, maka secara garis besar bisa ditarik kesimpulan tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membuat individu menjadi mandiri dengan potensi yang telah dimilikinya dalam menghadapi suatu tantangan kehidupan melalui suatu pembelajaran, pelatihan maupun kegiatan pemberdayaan lainnya.

2.1.3 Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan merupakan pedoman dalam menjalankan sebuah proses pemberdayaan yang memberikan batasan untuk menuju pada tujuan pemberdayaan tersebut. Dubois dan Miley (dalam Suharto, 2007: 68) mengemukakan beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan sebagai berikut :

2.1.3.1 Membangun relasi pertolongan yang :

- a. Merefleksikan respon empati,
- b. Menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*),
- c. Menghargai perbedaan dan keunikan individu,
- d. Menekankan kerja sama klien (*client partnership*).

2.1.3.2 Membangun komunikasi yang :

- a. Menghargai martabat dan harga diri klien,

- b. Mempertimbangkan keragaman individu,
- c. Berfokus pada klien,
- d. Menjaga kerahasiaan klien.

2.1.3.3 Terlibat dalam pemecahan masalah yang :

- a. Memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah,
- b. Menghargai hak-hak klien,
- c. Merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar,
- d. Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

2.1.3.4 Merefleksikan sikap dan nilai yang meliputi :

- a. Ketaatan terhadap kode etik profesi,
- b. Keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan.
- c. Penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik,
- d. Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Sementara menurut Soedijanto (2001) dalam Mardikato & Soebiato (2017: 108) memunculkan sebuah pemikiran tentang prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

- a. Kesukarelaan.

Kesukarelaan artinya keikutsertaan serta keterlibatan seseorang dalam pemberdayaan tidak boleh dilakukan karena adanya unsur paksaan,

melainkan harus berlandaskan oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan.

b. Otonom.

Otonom yaitu kemampuan untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.

c. Keswadayaan

Keswadayaan yaitu kemampuan untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.

d. Partisipasi

Partisipasi yaitu keterlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.

e. Egalier

Egalier yaitu menempatkan semua *stakeholder* dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.

f. Demokrasi

Demokrasi yang memberikan hak sama pada semua pihak untuk mengemukakan pendapat dan bisa untuk saling menghargai pendapat mampu perbedaan diantara sesama *stakeholders* tersebut.

g. Keterbukaan

Keterbukaan yang dilandasi kejujuran, saling percaya dan saling mempedulikan.

h. Kebersamaan

Kebersamaan sebagai usaha untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.

i. Akuntabilitas

Akuntabilitas disini yaitu bisa untuk dipertanggung jawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun saja.

j. Desentralisasi

Desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom untuk mengoptimalkan sumberdaya bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

2.1.4 Tahap – Tahap Pemberdayaan

Pelaksanaan suatu pemberdayaan sesuai pada tujuannya yaitu sebuah kemandirian, maka dalam prosesnya pemberdayaan akan dikatakan selesai apabila sudah tercapainya kemandirian tersebut. Oleh karena itu, suatu pemberdayaan tidak bersifat selamanya namun hanya sampai pada target masyarakat mandiri dan selanjutnya akan dilepas agar mandiri, walaupun masih ada pengawasan dari jauh untuk jaga-jaga agar tidak jatuh sewaktu-waktu (Sumodiningrat, 2000 dalam Mulyono, 2017: 44).

Dalam proses mencapai taraf mandiri, pemberdayaan harus melewati beberapa tahapan tertentu. Tahap-tahap yang dilalui berdasarkan yang dikemukakan Mulyono (2017: 44-45) yaitu, sebagai berikut :

2.1.4.1 Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku.

Tahapan pertama berupa penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap untuk melakukan persiapan dalam sebuah kegiatan pemberdayaan. Pada tahapan ini pemberdaya atau pelaku pemberdayaan mulai berusaha menciptakan prakondisi. Usaha tersebut dilakukan oleh pemberdaya agar bisa memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

Proses tahapan ini mengarahkan pada bagaimana sentuhan penyadaran pada masyarakat untuk lebih bisa membuka keinginan dan kesadarannya tentang kondisi mereka saat itu. Sehingga, dengan demikian akan merangsang adanya keinginan untuk memperbaiki kondisinya kearah depan yang lebih baik.

Sebagai penekanan, pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku ini, sangat perlu adanya bantuan peran seorang fasilitator atau pendamping. Pendamping berperan untuk memberi masukan positif dan pengarahannya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya, membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pemberdayaan bagi masyarakat (Rahmawati & Kisworo, 2017: 167).

2.1.4.2 Tahap Transformasi Kemampuan.

Tahapan selanjutnya ini akan bisa berjalan setelah tahap pemberdayaan yang pertama tersebut berlangsung dengan baik dan terkondisikan. Masyarakat

yang telah membuka kesadaran tentang kondisinya dan ingin berubah selanjutnya akan mulai belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan mereka. Kondisi tersebut akan mendorong terjadinya keterbukaan wawasan dan penguasaan kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan.

Pada proses tahapan ini, masyarakat dapat memberikan peran partisipai pada tingkat rendah. Dimana mereka hanya sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan, belum pada tingkatan subjek pembangunan.

2.1.4.3 Tahap Peningkatan Kemampuan dan Inovatif.

Pada tahap ketiga ini sangat dibutuhkan sebuah pengayaan atau peningkatan kualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, agar masyarakat dapat membentuk suatu kemampuan kemandirian. Tahap ini akan didukung setelah adanya kesadaran akan potensi dan kemampuan individu masyarakat. Djara, Raharjo, dan Suminar (2018: 3) mengungkapkan bahwa :

“After aware of capabilities and potentials have been the around, and on the insight ability in knowledge, skill and attitude that open insight and impart skills the base so as to can take in the in development and having initiative and innovative ability to deliver independency activities”.

Kemandirian itu tercipta dengan ditandainya oleh kualitas kemampuan masyarakat untuk bisa inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan pembangunan. Konsepnya dalam pembangunan masyarakat, kondisi yang telah mencapai pada taraf seperti yang telah disebutkan bisa didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Sehingga peran pihak eksternal sebelumnya hanya sebagai fasilitasator.

Menurut Sudjana dalam Muslikhah dan Nurhalim (2014: 48-49) dalam suatu proses pembelajaran, upaya pemberdayaan itu meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Perencanaan adalah upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian atau tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi/lembaga (Sudjana, 2003: 63). Perencanaan merupakan kegiatan untuk mengarahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fakhrudin, 2011: 9).

Adapun perencanaan dalam proses pembelajaran (Sudjana dalam Muslikhah & Nurhalim, 2014: 48-49) meliputi: (a) Identifikasi kebutuhan adalah penentuan perbedaan keadaan nyata dan kondisi yang diinginkan manusia, (b) Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, (c) Kurikulum adalah kumpulan pengalaman dan gagasan yang ditata dalam bentuk kegiatan sebagai proses pembelajaran sedemikian rupa, disajikan dengan metode dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada, (d) Sumber belajar adalah semua sarana penyajian yang mampu menyajikan pesan, baik secara audio maupun visual, (e) Sumber dana yaitu sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, (f) Strategi pembelajaran adalah tipe pendekatan spesifik untuk menyampaikan informasi dan kegiatan yang mendukung penyelesaian tujuan pembelajaran (Sudjana, 2003: 63).

Menurut Sudjana (2003: 63), kegiatan pelaksanaan merupakan suatu proses yang dimulai dari implementasi awal mencakup persiapan-persiapan sebelum kegiatan, dilakukan implementasi merupakan aspek kegiatan teknis yang

dilakukan. Sedangkan implementasi akhir mencakup akhir dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi hasil kegiatan dan pelaporan.

Menurut Suharto (dalam Muslikhah dan Nurhalim, 2014: 49), evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu rencana kegiatan atau tujuan. Evaluasi bertujuan untuk: a) Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, b) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran, c) Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana.

Tahapan – tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat Tim Delivery menawarkan dalam buku Mardikanto dan Soebianto (2017: 125) yang dimulai dari prose seleksi lokasi, sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara lebih rinci, masing – masing tahap tersebut diuraikan dengan sebagai berikut:

- a. Tahap 1 : Seleksi Lokasi
- b. Tahap 2 : Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat
- c. Tahap 3 : Proses Pemberdayaan Masyarakat

Meliputi Kajian keadaan pedesaan partisipatif, Pengembangan kelompok, Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, Monitoring dan evaluasi partisipatif.

- d. Tahap 4 : Pemandirian Masyarakat

2.1.5 Pendekatan Pemberdayaan

Pada suatu pemberdayaan pendekatan yang digunakan menjadi berbeda ketika melihat adanya sudut pandang yang berbeda pula pada pemaknaan hakekat

pemberdayaan. Suharto (2005) dalam (Mulyono, 2017: 46) menyatakan bahwa akibat dari pemahaman hakekat pemberdayaan yang berbeda, lahirlah dua sudut pandang yang kontradiktif yaitu *zero-sum* dan *positive-sum*.

Pendekatan *zero-sum* mengartikan pemberdayaan merupakan pertemuan dari pihak yang kuat menghadapi kelompok lemah yang mengakibatkan berkurangnya daya pada kelompok kuat. Pendapat pada pendekatan ini lebih menganalisis pemberdayaan dalam pengertian pengalihan kekuasaan. Pendekatan kedua, yaitu *positive-sum* mengartikan pada suatu proses pemberdayaan dari pihak berkuasa/berdaya kepada pihak lemah justru akan menguatkan kedua pihak. Pendapat pada pendekatan yang kedua ini tidak melihat adanya dampak negatif untuk kedua pihak, justru pihak yang berdaya akan mendapatkan kekuatan lain dalam setiap pemberdayaan yang dilakukannya (Mulyono, 2017: 47).

Selain pada pendekatan pemberdayaan berdasarkan pemahaman hakekat tersebut, pendekatan pemberdayaan juga sering dikaitkan pada konsep pembangunan. Pada konsep pembangunan terdapat dua pendekatan yang populer yakni pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* (dari atas) menempatkan pemerintah pusat sebagai pencetus gagasan dengan asumsi mereka tahu yang terbaik bagi masyarakatnya, tanpa harus mendengarkan aspirasi masyarakat dibawahnya untuk dilibatkan atau dimobilisasi dengan memberikan insentif dan atau menumbuhkan rasa takut (Sururi, 2016: 2). Pemberdayaan disebut sebagai proses pembangunan dalam pendekatan *bottom-up*. Pencapaian keberhasilan sebuah pemberdayaan dapat dilakukan dengan penggunaan pendekatan *bottom-up*, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan dari

masyarakat (Anwas, 2014: 87). Pada pendekatan *bottom-up*, mengarahkan pembangunan dan pemberdayaan tidak terpusat tapi lebih mengarah pada desentralisasi ke pemerintah dan masyarakat daerah. Juan-Garcia, Escrig-Tena & Roca (2017: 130) menyebutkan :

“The findings suggest that from both its perspectives – structural and psychological – empowerment is a valuable way of enhancing organizational performance in local governments”.

Penelitian tersebut menyatakan bahwa dari kedua perspektif, yaitu pemberdayaan struktural dan psikologis adalah cara yang berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi di pemerintah daerah.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pendekatan dalam pemberdayaan berdasarkan pada sifatnya itu terdiri dari pendekatan mikro, mezzo dan makro (Mardikanto & Soebianto, 2017: 160-161).

2.1.5.1 Pendekatan Mikro

Pendekatan berupa pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien (penerima manfaat) dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

2.1.5.2 Pendekatan Mazzo

Pendekatan berupa pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.

2.1.5.3 Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system*), karena penerima manfaat perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Pada pendekatan ini klien dipandang sebagai orang yang telah memiliki kompetensi dalam proses pemahaman situasi kondisi mereka sendiri dan menentukan tindakan yang tepat untuk dilakukan (Soleh, 2014: 99).

2.2 Masyarakat

2.4.1 Definisi Masyarakat

Masyarakat dalam berbagai pembahasan selalu dikaitkan dengan istilah bahasa Inggris "*society*" yang merupakan berasal kata *socius* dalam bahasa Latin, berarti "kawan". Penggunaan istilah masyarakat di Indonesia sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab "*syaraka*" yang berarti "ikut serta, berpartisipasi". Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi" (Koentjaraningrat, 2009: 116). Menurut Harton & Hunt (1999: 59) masyarakat merupakan satu kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, memiliki kebudayaan yang sama, mendiami suatu wilayah tertentu dan melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompoknya.

Masyarakat pada penelitian ini merupakan warga penduduk yang menetap di wilayah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

2.4.2 Fungsi Masyarakat

Raymond Fith (1966) dalam (Moeis, 2008: 4) mengemukakan terdapat faktor penting yang bisa menunjukkan eksistensi dan fungsi sosial dari suatu masyarakat, yaitu :

2.2.2.1 *Social Allignment,*

Sosial Allignment yang didalamnya termasuk juga struktur sosial dalam arti sempit, merupakan sistem pengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, kekerabatan, bentuk-bentuk perkumpulan berdasarkan pekerjaan yang sama, perkumpulan rekreasi, kedudukan atau status peranan.

2.2.2.2 *Social Controls,*

Social Controls merupakan sebuah sistem dan proses yang berfungsi mengatur kegiatan serta tingkah laku para anggota masyarakat. Sistem inilah yang biasanya disebut dengan sistem pengendalian sosial yang untuk berfungsi mengendalikan anggota masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya.

2.2.2.3 *Social Media,*

Social Media adalah segala jenis peralatan dan perlengkapan baik yang berupa benda maupun bahasa yang dijadikan media oleh anggota-anggota masyarakat didalam melangsungkan komunikasi dan berinteraksi dengan sesama masyarakat.

2.2.2.4 *Social Standards*,

Social Standards merupakan ukuran-ukuran sosial yang digunakan untuk menentukan dan menilai seluruh kegiatan atau untuk menilai efektif tidaknya suatu kegiatan.

Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi pokok yang penting. Masyarakat memiliki kedudukan sebagai objek sekaligus objek dalam pemberdayaan apabila di kaitkan dalam pemberdayaan sebagai sebuah proses pembelajaran. Selaras dengan pendapat Imaniar, Sutarto dan Mulyono (2019: 3) menjelaskan :

“Learners in the learning system are the main components that act either as subjects or objects. It is considered as subjects because students are individuals who carry out the learning process and are expected to be able to achieve behavioral changes in them”.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait pemberdayaan dan masyarakat merupakan sebuah proses atau usaha dalam memberikan daya pada sekelompok masyarakat tertentu. Proses pemberdayaan sebagai proses selalu harus melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan juga evaluasi (Hajaroh & Mulyono, 2014: 30).

Pemberdayaan juga lebih jelasnya dimaknai sebagai setiap usaha pendidikan dengan tujuan membangkitkan kesadaran dan keinginan untuk memiliki pengetahuan (*knowledges*), keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*abilities*) yang

pada akhirnya akan bisa digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Subekti, 2018: 150).

2.4 Bank Sampah

Perlindungan terhadap alam dan lingkungan merupakan tanggung jawab manusia, baik manusia secara individu, golongan, maupun organisasi. Proses perlindungan lingkungan dan alam sejatinya sudah banyak diatur baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam norma nilai masyarakat.

Pola yang dibangun dalam usaha perlindungan lingkungan dan alam seringkali kurang tepat ataupun tidak berjalan efektif dalam masyarakat. Inovasi dalam rangka perlindungan seperti ini sangat dibutuhkan untuk secara tepat guna melindungi tidak hanya lingkungan tapi lebih jauh juga kepada individu manusia.

Bank sampah menjadi salah satu inovasi yang banyak digunakan di berbagai wilayah. Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk (Nugraha, dkk: 2018). Sistem bank sampah (*wasted bank*) dilihat sebagai inovasi yang tepat dalam mewujudkan pola perlindungan lingkungan yang baik dan mulai digunakan pada berbagai daerah di Indonesia.

2.4.1 Pengertian Bank Sampah

Dalam menentukan makna yang tepat terhadap pengertian bank sampah, akan lebih mudah ditemukan pemahaman apabila kita maknai terlebih dahulu kedua padanan kata, yaitu bank dan sampah.

2.4.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank secara hukum di Indonesia dituangkan dalam rumusan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Tahun 1992 tentang perbankan Bab I pasal 1 ayat 2 bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka”

Bank secara istilah konvensional bisa memiliki arti sebagai lembaga pengatur keuangan yang kegiatan usahanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.

2.4.1.2 Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu benda ataupun bahan yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi secara fungsional dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika memberikan sebuah batasan pada pengertian sampah (*waste*), yaitu sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang dimana sesuatu tersebut berasal dari kegiatan manusia dan dengan tidak terjadi secara sendirinya (Nugroho, 2017: 148).

Berdasarkan pada kedua pengertian masing-masing padanan kata tersebut, sebenarnya akan mudah untuk bisa menarik sebuah pengertian jelas dari bank sampah. Namun memang terdapat sedikit pemahan yang harus diluruskan lagi dari pengertian bank secara umum tersebut. Dimana dalam pengertian kali ini bank tidak hanya dimaknai untuk mengatur dan menghimpun dana berupa uang tapi juga benda atau barang lainnya.

Jadi, yang dimaksud bank sampah adalah suatu badan usaha yang menghimpun sampah dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada pengolah sampah tertentu. Bank sampah dalam arti sitem adalah sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif (menampung – memilah – menyalurkan) yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif didalamnya. Serta akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ikut serta.

Konsep bank sampah yang demikian sering kali disamakan dengan badan usaha pengelolaan sampah lainnya. Seperti yang sudah ada sebelumnya pada sektor informal yaitu dari pemulung dan pengepul sampah. Raharjo dan Matsumoto (2015: 4) memberikan penjelasan batasan perbedaan bank sampah dengan pengelolaan sampah informal lainnya sebagai berikut :

“SW bank program is different from other informal sectors such as waste pickers, scavengers and itinerant buyers. SW bank program aims to disseminate 3R concept and train its citizens at the level of application. SW bank program is created for various level of society, waste separation at source as a habit and a sustainable society preparation. Whereas, the other informal sectors are only done by unemployed people, emerged just to get money, forced to sort SW at transfer station or landfill site. Therefore, both have different concept and purpose”.

Program bank sampah dibuat untuk berbagai tingkat masyarakat, pemisahan sampah pada sumbernya sebagai kebiasaan dan persiapan masyarakat yang berkelanjutan. Sedangkan, sektor informal lainnya hanya dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, muncul hanya untuk mendapatkan uang, terpaksa memilah sampah di tempat-tempat sampah atau tempat pembuangan akhir. Karena itu, keduanya memiliki konsep dan tujuan yang berbeda.

2.4.2 Klasifikasi Sampah

Pembagian jenis sampah secara umum yang berdasarkan kajian-kajian dari peneliti populer dikenal menjadi sampah organik dan an-organik. Sampah ada yang bersifat mudah terurai secara alami (*degradable*) dan ada yang tidak dapat terurai (*undegradable*) yang biasa disebut “Sampah Rumah Tangga” (Linda, 2016: 6). Akan tetapi secara lebih lengkap lagi bila diartikan sebagai suatu residu, sampah dapat di bagi ke dalam beberapa katagori berdasarkan sumber dari jenis pengklasifikasiannya, sebagai berikut (Budiman, 2005 dalam Riyadi, 2014: 208-209):

2.4.2.1 Berdasarkan kandungan zat kimia :

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Contohnya yaitu sisa makanan, daun, sayuran dan buah-buahan.

b. Sampah Non-organik

Sampah nonorganik yakni sampah yang muncul akibat dari bahan-bahan non hayati, baik sebagai produk sintetik ataupun hasil pengolahan teknologi bahan tambang, hasil olahan bahan hayati dan sebagainya. Contohnya adalah logam, pecah-belah, abu dan lain-lain. Sebagian zat an-organik, secara keseluruhan tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme (*unbiodegradable*), sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam proses waktu yang lama.

2.4.2.2 Berdasarkan dapat atau tidak dibakar :

- a. Mudah terbakar, misalnya yaitu kertas, kayu, plastik dan daun kering serta lainnya.
- b. Tidak mudah terbakar, contohnya adalah kaleng, besi, kaca dan lain-lain.

2.4.2.3 Berdasarkan dapat atau tidaknya proses pembusukan :

- a. Mudah membusuk, contohnya yaitu sisa makanan, potongan daging dan lain-lain.
- b. Sulit membusuk, contohnya adalah plastik, kaleng, besi, karet dan lain sebagainya.

2.4.2.4 Berdasarkan Karakteristik Sampah :

- a. *Garbage*, yaitu sampah yang terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca

panas. Proses pembusukan sering kali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya.

- b. *Rubbish*, jenis sampah ini di bagi menjadi dua; **Pertama**, jenis sampah *rubbish* yang mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik semisal kertas, kayu, karet, daun kering dan lain sebagainya. **Kedua**, jenis sampah *rubbish* yang tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat an-organik semisal kaca, kaleng dan lainnya.
- c. *Ashes* yaitu jenis sampah dari semua sisa pembakaran dari mesin industri.
- d. *Street Sweeping*, yaitu aneka sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.
- e. *Dead Animal*, yaitu sampah dari jenis bangkai binatang besar seperti anjing, kucing dan lainnya yang mati akibat kecelakaan atau mati secara alamiah.
- f. *House hold refuse*, yaitu jenis sampah campuran semisal *garbage*, *ashes*, *rubbish* yang berasal dari perumahan atau pemukiman.
- g. *Abandoned vehicle*, yaitu jenis sampah yang berasal dari bangkai kendaraan.
- h. *Demolition waste*, yaitu sampah yang berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung. Sampah jenis ini juga dikenal dengan *contructions waste* dan biasanya berwujud material tanah uruk, batu dan kayu.

- i. *Santage solid*, yaitu jenis sampah yang terdiri dari benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.
- j. Sampah industri, yaitu segala jenis residu dari sektor pertanian, perkebunan dan industrial.
- k. Sampah khusus, berupa sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.

2.4.3 Konsep Bank Sampah

Penanganan pada pengolahan sumber sampah memiliki konsep tersendiri, dimana perilaku penanganan disesuaikan pada jenis dan karakteristik sampah. Pada konsep bank sampah berbeda pada penanganan sampah yang lain seperti konsep pengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Bank sampah menggunakan konsep penanganan pendekatan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Konsep 3R tersebut dilakukan dengan cara mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah (*reduce*), menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan kembali (*reuse*) dan mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang dan produk baru yang bermanfaat (*recycle*) (Shentika, 2016: 94-95).

4.1.5.1 Reduce (Pengurangan)

Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, contohnya ketika belanja membawa kantong/keranjang dari rumah, mengurangi kemasan yang tidak perlu, menggunakan kemasan

yang dapat didaur ulang, misalnya bungkus nasi menggunakan daun pisang atau daun jati.

4.1.5.2 Reuse (Penggunaan Kembali)

Reuse adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang masing dapat digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain, contohnya berupa botol bekas minuman dirubah fungsi jadi tempat minyak goreng, ban bekas, dimodifikasi jadi kursi dan pot bunga.

4.1.5.3 Recycle (Daur Ulang)

Recycle adalah salah satu dari bagian konsep 3R dimana kegiatannya yaitu mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

2.4.4 Mekanisme Sistem Bank Sampah

Pelaksanaan program bank sampah memiliki mekanisme yang sedikit berbeda dengan bank konvensional, meskipun prosedural secara umum sama. Utami (2013: 30-31) menyebutkan setidaknya mekanisme sistem bank sampah terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

2.4.4.1 Pemilahan Sampah

Pada tahap ini, nasabah atau masyarakat peserta bank sampah harus memilah terlebih dahulu sebelum disetorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Misalnya berdasarkan kategori sampah antara organik dan an-organik.

Biasanya sampah an-organik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahannya berupa plastik, kertas, kaca dan jenis lainnya.

Pengelompokan sampah seperti tersebut akan memudahkan pada proses selanjutnya yaitu penyaluran sampah. Apakah akan disampaikan ke tempat pembuatan kompos, pabrik plastik atau industri rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung juga ikut serta membantu mengurangi tumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan akhir. Karena, sebagian besar sampah yang sebelumnya langsung ke pembuangan akhir telah dikurangi dengan pemilahan yang dilakukan masyarakat dan dikirimkan ke bank sampah akan dimanfaatkan kembali. Sehingga sampah yang masuk ke pembuangan akhir benar-benar tinggal sampah yang memang tidak memiliki nilai ekonomis dan berbahaya.

2.4.4.2 Penyetoran Sampah ke Bank

Mekanisme selanjutnya adalah poses penyetoran sampah ke Bank. Proses penyetoran ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan bersama atau dari pihak pengelola bank sampah. Misalnya, ditentukan waktunya 1 minggu 1 atau 2 kali penyetoran setiap hari sabtu dan minggu. Penjadwalan seperti ini dimaksudkan untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan ke pengepul. Hal ini dilakukan supaya sampah tidak tertimbun dan menumpuk di lokasi bank sampah.

2.4.4.3 Penimbangan

Setelah nasabah melakukan pemilahan sampah miliknya dan dibawa ke bank sampah pada waktu yang ditentukan untuk di setorkan, selanjutnya sebelum masuk ke bank sampah adalah melakukan penimbangan. Sampah yang sudah dibawa ke bank kemudian ditimbang. Berat sampah yang bisa disetorkan oleh nasabah ke bank sampah sudah ditentukan pada kesepakatan sebelumnya. Misalnya harus minimal yang disetor itu 1 kilogram.

2.4.4.4 Pencatatan

Mekanisme selanjutnya yaitu pencatatan yang dilakukan oleh petugas bank sampah. Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan dilakukan. Hasil dari pengukuran tersebut lalu dikonversikan ke dalam nilai rupiah yang kemudian dicatat di buku tabungan nasabah. Pada sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap dua atau tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan tabungan yang sifatnya sosial tergantung pada jenis tabungan program yang tersedia dari pengelola bank sampah.

2.4.4.5 Pengangkutan

Tahapan mekanisme selanjutnya adalah pengangkutan. Tahapan ini pihak pengelola bank sampah sudah harus bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati bersama. Selanjutnya, setelah proses sampah yang sudah terkumpul, ditimbang dan dicatat akan bisa langsung

diangkut ke tempat pengolahan sampah tersebut. Sehingga, tidak terjadi penumpukan sampah di lokasi bank sampah.

2.4.5 Pengembangan Bank Sampah

Pada proses pelaksanaan sistem bank sampah ini berjalan dalam waktu yang signifikan dan dengan pengelolaan yang baik dan benar, maka akan banyak keuntungan terutama dalam potensi ekonominya. Bank sampah dengan pengelolaan keuangan yang baik, akan memiliki perkembangan yang diproyeksikan bagus, oleh karena itu setidaknya bank sampah memiliki potensi pengembangan sebagai berikut (Utami, 2013: 18-19) :

2.4.5.1 Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam memiliki karakteristik dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah.
- b. Dana yang dipinjamkan diambil dari omset bank sampah.
- c. Uang yang dipinjam nasabah bisa dikenakan bunga, tapi bunga yang dibebankan sebaiknya tidak terlalu besar. Penetapan persentase bunga berdasarkan prinsip biaya jasa peminjaman saja bukan untuk mngambil keuntungan.
- d. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tiga sampai empat kali cicilan.

- e. Pengambalian pinjaman juga bisa dengan uang nasabah yang tersimpan di tabungan bank sampah atau dalam arti lain dengan menabung sampah.

2.4.5.2 Unit Usaha Sembako

Unit usaha sembako memiliki karakteristik dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah.
- b. Pemesanan sembako bisa dilakukan saat penyetor sampah dan sembako bisa diambil pada masa penyetoran sampah berikutnya.
- c. Pembayaran bisa dengan dana yang tersimpan di tabungan bank sampah atau berarti dengan menabung sampah.
- d. Pembayaran bisa dilakukan dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dengan tiga kali tahap cicilan.

2.4.5.3 Koperasi Bank Sampah

Koperasi bank sampah memiliki karakteristik dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap nasabah diwajibkan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- b. Simpanan pokok adalah dana yang dibayarkan sekali saat melakukan pendaftaran anggota koperasi bank sampah.
- c. Simpanan wajib adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi bank sampah setiap bulannya, Besaran dari simpanan wajib lebih kecil nominalnya dari pada simpanan pokok.

- d. Pembayaran simpanan wajib dan simpanan pokok bisa dengan menggunakan uang hasil dari penjualan sampah dalam transaksi di bank sampah.

2.4.5.4 Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman modal usaha memiliki karakteristik dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan fasilitas khusus bagi nasabah dari bank sampah.
- b. Nasabah memberikan proposal usaha yang akan dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari bank sampah. Pengelola bank akan memutuskan kelayakan usaha beserta besaran dana yang akan dipinjamkan.
- c. Uang yang dipinjamkan kepada nasabah bisa dikenakan bunga. Tapi bunga yang dibebankan sebaiknya kecil. Penetapan prosentase bunga berdasarkan prinsip biaya jasa peminjaman saja bukan untuk mendapat keuntungan lebih.
- d. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan bagi hasil usaha, presentase bagi usaha bisa ditentukan langsung oleh pengelola sendiri atau melalui kesepakatan bersama saat akad peminjaman modal.
- e. Pengembalian pinjaman juga bisa menggunakan dana yang tersimpan di tabungan bank sampah atau bisa dengan cara menabung sampah.

2.5 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2017: 91) menjelaskan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

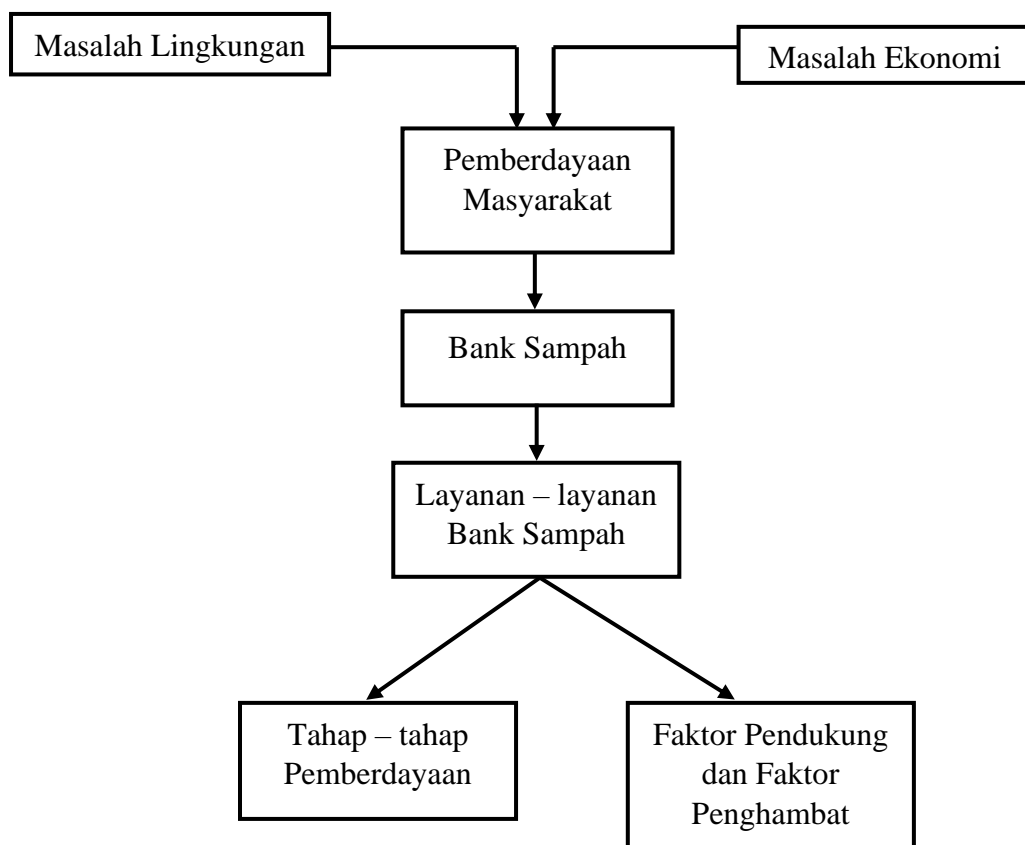
Masalah lingkungan menjadi salah satu yang sering dibicarakan dalam berbagai kajian di masyarakat. Lingkungan yang bermasalah bisa diakibatkan melalui beberapa faktor baik akibat dari alam itu sendiri maupun bersumber dari manusianya itu sendiri. Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling banyak diresahkan dewasa ini, dimana orang semakin hari semakin banyak memproduksi sampah sedangkan lahan untuk bisa menampung sampah sendiri semakin sempit. Pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan menjadi ancaman tersendiri yang menunjukkan kesadaran sikap yang rendah dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Masalah selanjutnya adalah masalah ekonomi, dimana setiap masyarakat memiliki kebutuhan hidup masing-masing. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat sudah seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap orang. Akan tetapi, kemampuan tersebut belum bisa dikatakan secara menyeluruh dimiliki masyarakat. Berbagai kalangan masyarakat masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga inilah yang sering dikatakan dengan kemiskinan.

Berdasarkan pada kedua masalah tersebut yaitu masalah lingkungan yang berupa sampah dan masalah ekonomi yang berupa kemiskinan perlu untuk dicarikan solusi. Jalan solusi tersebut salah satunya adalah melalui program

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat akan membantu masyarakat agar bisa untuk mandiri terhadap masalah yang dihadapinya.

Bank Sampah merupakan alternatif pemberdayaan masyarakat yang cocok dimana fungsinya selain pada menjaga lingkungan bersih dan sehat, tetapi juga memiliki dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Bank Sampah melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan pemberdayaan harus dilakukan melalui program-program layanan. Program layanan-layanan bank sampah inilah yang selanjutnya bisa diteliti berupa tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pemberdayaan masyarakat dari bank sampah.



Gambar 1.0. Kerangka Berpikir

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan tersebut, didapatkan sebuah simpulan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Lerep. Simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Lerep dilakukan melalui tiga tahap yaitu : 1) tahap penyadaran, 2) tahap transformasi kemampuan, 3) tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan-keterampilan.

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan menggunakan pendekatan kelompok berupa sosialisasi di Kelompok Tahlilan Ibu-ibu RT dan pendekatan individu melalui ajakan langsung pengurus.

2. Tahap Transformasi Kemampuan

Setelah dilakukannya sosialisasi, dilaksanakan beberapa program untuk transformasi kemampuan dari masyarakat, yaitu :

a. Tabungan Sampah

Program tabungan sampah melayani masyarakat untuk menabung sampah kering miliknya dengan nilai tukar rupiah sesuai dengan harga yang ditentukan.

b. Pembayaran BPJS – Ketenagakerjaan Menggunakan Sampah

Program ini merupakan sistem supaya masyarakat yang belum mempunyai jaminan sosial ketenagakerjaan bisa mendaftar dengan menyetorkan sampah.

c. Pelatihan Kreasi Daur Ulang Sampah

Layanan pelatihan kreasi daur ulang sampah berupa pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah tertentu.

d. Pelatihan Pembuatan Kompos Takakura

Pelatihan ini dilakukan dengan pengajaran pembuatan kompos guna mengurangi timbunan sampah organik di masyarakat.

2. Tahap Peningkatan Intelektual dan Kecakapan-Keterampilan

Pengayaan kemampuan tersebut dijalankan lebih kepada pembiasaan dari kegiatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar. Perubahan sikap dan keterampilan masyarakat tersebut dapat diamati berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Terbentuknya TPS-3R.

Keberadaan Bank Sampah mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah organik dengan melakukan kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga sebelum tugas tersebut diambil alih oleh TPS-3R.

b. Hilangnya Budaya Membuang Sampah Sembarangan.

Setelah keberadaan dan berlangsungnya program Bank Sampah, masyarakat di Desa Lerep tidak lagi membuang sampah sembarangan.

c. Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah

Perubahan sistem pengelolaan sampah dari masyarakat yang sebelumnya dibuang sembarangan menjadi dikelola dengan pengolahan sampah.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah adalah :

- a. Bantuan dan dukungan dari DLH Kabupaten Semarang.
- b. Sikap masyarakat yang terbuka akan inovasi.
- c. Pengepul yang merupakan anggota dari Bank Sampah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah adalah :

- a. Kesibukan dari masing-masing pengurus Bank Sampah.
- b. Gedung bank sampah yang masih digunakan oleh pihak PAUD Lerep.
- c. Kekurangan sumberdaya manusia muda untuk aktif menjadi pengurus.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti dapat mengajukan beberapa saran untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Pengorganisasian pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebaiknya lebih diperbaiki dalam tahap evaluasi untuk dilakukan secara rutin.
2. Pengurus Bank Sampah sebaiknya melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pihak pemerintah Desa Lerep untuk membantu pengajuan pengalihan tempat kegiatan PAUD guna optimalisasi operasional kerja.
3. Pengurus Bank Sampah bisa mengadakan kegiatan yang sesuai dengan minat pemuda setempat sebagai wadah pengkaderan pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, A., Marthono, E., & Muhammad. 2017. Pemberdayaan melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No. 1.
- Annisa, M., Abrori, F., & Listiani. 2018. Pemberdayaan Mahasiswa dalam Penerapan Prinsip Pengelolaan Sampah menggunakan Pola 4R. *Jurnal Pendidikan IPA*, Vol. 8, No. 2, Hal. 75-81.
- Anwas, O. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asteria, D., & Heruman, H. 2016. Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 23, No.1, Hal. 136-141.
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi. 2007-2019.
- Badan Pusat Stastik. Jumlah Timbulan Sampah di Indonesia. 2016.
- Bungin, B. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Desmawati, L., Rifa'i, A., & Mulyono, S. E. 2015. Penanggulangan Masyarakat Miskin Kota Rawan Kriminalitas melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Nonformal di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 2, No. 2, Hal. 79-88.
- Djara, J., Raharjo, T., & Suminar, T. 2019. Community Empowerment Through Weaving Bond Training in The Family Planing Village Program (Case Studi at Desa Taraf Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur). *Journal of Nonformal Education*, ISSN. 2528-4541.
- Fakhrudin, A. 2011. *Evaluasi Program Pendidikan Nonformal*. Semarang: UNNES Press.
- Gopal, G., Patil, B., & Shibin, K. 2017. Conceptual Frameworks for Drivers and Barriers of Integrated Sustainable Solid Wasted Management . *Management of Enviromental Quality: An International Journal*, Vol. 29, No. 3, Hal. 516-546.
- Hajaroh, L., & Mulyono, S. 2014. Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata melalui Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Kandri Kota Semarang. *Journal of*

- Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 3, No. 2, Hal. 29-35.
- Harahap, F. I. 2018. Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Biogas dalam Mewujudkan Kemandirian Energi. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, Hal. 41-50.
- Harton, P., & Hunt, C. 1999. *Sosiologi*. (D. Ram, & Sobari, Penerj.) Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, S., Djumena, I., & Darmawan, D. 2018. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Kreatif melalui Pelatihan Pembuatan Keset dari Limbah Kain. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 2, No. 1, Hal. 20-30.
- Huraerah, A. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat (Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan)*. Bandung: Humaniora.
- Imaniar, M., Sutarto, J., & Mulyono, S. 2019. Songket Fabric Weaving Training in Empowering Poor Women at Home Industry in Bima City, West Nusa Tenggara Province. *Journal of Nonformal Education*, ISSN: 2528-4541.
- Irfansyah, P., & Haryono, S. 2018. Model E-Commerce Produk Daur Ulang Bank Sampah Menggunakan UML. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, Vol. 3, No. 2, Hal. 163-169.
- Ismawati, A. 2016. Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ukm Mandiri Di Rw 002 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Hal. 58-74.
- Iswanto., Sudarmadji., Wahyuni, E., & Sutomo, A. 2016. Timbulan Sampah B3 Rumah Tangga dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Manusia dan Lingkungan UGM*, Vol. 23, No. 2, Hal. 176-188.
- Juan-Garcia, B., Escrig-Tena, A., & Roca-Puig, V. 2018. The Empowerment - Organization Performance Link in Local Governments. *Journal of Personnel Review*, Vol. 48, No. 1, Hal. 118-140.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusminah, I. 2018. Penyuluhan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) dan Kegunaan Bank Sampah sebagai Langkah Menciptakan Lingkungan Bersih dan Ekonomis di Desa Mojowuku Kabupaten Gresik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Hal. 22-28.

- Kusuma, D., & Astuti, Y. 2017. Sistem Pengolahan Data Bank Sampah (Study Kasus : Bank Sampah Bangkit Pondok I Ngemplak Sleman). *Jurnal Mantik Penusa*, Vol. 21, No.1, Hal. 32-41.
- Linda, R. 2016. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai). *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No.1, Hal. 17-24.
- Ma'arif, R., Zulkarnain, Nugroho, T., & Sulistiono. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Pengembangan Perikanan Tangkap di Desa Majakerta, Indramayu. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Hal. 17-24.
- Malik, A., & Mulyono, S. 2017. Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat . *Jurnal Pendidikan Nonformal*, Vol. 1, No. 1, Hal. 87-101.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moeis, S. 2008. *Struktur Sosial : Kelompok dalam Masyarakat*. Bandung: FPIPS UPI.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskadaya.
- Mulyawan, R. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD Press.
- Mulyono, S. E. 2017. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mulyono, S. E. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Jalur Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, Hal. 51-60.
- Muslikhah, & Nurhalim, K. 2014. Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi Petani Wanita (Studi Pelatihan Penggemukan Kambing di Desa Kalimanggis Kabupaten Batang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 1, No. 2, Hal. 87-99.
- Noor, M. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, Hal. 87-99.
- Nugraha, A., Sutjahjono, S., & Amin, A. 2018. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah

- Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 8, No. 1, Hal. 7-14.
- Nugroho, R. 2017. Keberdayaan Perempuan Pasca Pelatihan Mengelola Sampah bagi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, Hal. 146-156.
- Nurmayasari, D., & Ilyas. 2014. Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif di Dusun Daleman, Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 3, No. 2, Hal. 16-21.
- Obeng, P., Donkor, E., & Mensah, A. 2009. Assessment of Institutional Structures for Solid Waste Management in Kumasi. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, Vol. 20, No. 2, Hal. 106-120.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Raharjo, S., Matsumoto, T., Ihsan, T., Rachman, & Gustin. 2015. Community-Based Solid Waste Bank Program for Municipal Solid Waste Management Improvement in Indonesia: A Case Study of Padang City. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, Hal. 1-11.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. 2017. Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 1, No. 2, Hal. 161-169.
- Rajest, Preethi. 2019. Solid Waste Management Sustainability towards a Better Future, Role of CSR – a Review. *Journal of Social Responsibility*, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-9.
- Ratriabrani, N. & Purbadharmaja, I. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah : Model Logit. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9, No. 1, Hal. 53-58.
- Riyadi, S. 2014. Reiventing Bank Sampah : Optimalisasi Nilai Ekonomis Limbah Sampah Berbasis Pengelolaan Komunal Terintegritas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Hal. 206-215.
- Romadoni, Tahyudin, D., & Hustin, A. 2018. Pembinaan Masyarakat dalam pemanfaatan Limbah Sampah di Bank Sampah Pramulih. *Journal of Noformal Education and Community Empowerment*, Vol. 1, No. 2, Hal. 31-39.

- Shentika, P. 2016. Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo. *JESP*, Vol. 8, No. 1, Hal. 92-100.
- Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (3).
- Sholeh, C. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Subekti, Setiyanti, & Hafiar. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kawistara UGM*, Vol. 8, No. 2, Hal. 111-212.
- Sucipto, N., & Sutarto, J. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup melalui Kursus Menjahit di LKP Elisa Tegal. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Hal. 135-142.
- Sudjana, D. 2013. *Sistem dan Manajemen Pelatihan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Falah Production.
- Sudjana, N. 2014. *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sufia, R., Sumarmi, & Amirudin, A. 2016. Kearifan Lokal dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 1, No. 4, Hal. 726-731.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2013. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sururi, A. 2016. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2, Hal. 1-25.
- Suryani, A. 2014. Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5, No. 2, Hal. 71-84.
- Sutarto, J. 2016. *Pendidikan Non Formal (Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat)*. Semarang: UNNES Press.
- Tanuwijaya, F. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah PITOE Jambangan, Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 2, Hal. 230-244.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Bab 1 Pasal 1 Ayat (2)

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Utami, E. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta:
Yayasan Unilever.